

Terganjial Aset Daerah

MEMPAWAH- Mempawah sebelumnya sudah mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Bahkan dua kali berturut-turut, pada pemerintahan sebelumnya

Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap hasil audit BPK terkait pelaksanaan APBD diraih di masa pemerintahan Bupati terdahulu. Bahkan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), telah diterima Pemkab sejak lima tahun anggaran belakangan ini.

Atas hasil itu, Rubijanto Wakil Bupati Pontianak, memberikan penjelasan kepada koran ini seraya mengatakan, sulitkan Kabupaten Mempawah untuk mendapat opini WTP terhadap pelaksanaan anggaran, terganjal masalah aset daerah yang belum terselesaikan, pasca pemengkaran kabupaten.

"Sesungguhnya masalah pengolahan keuangan tidak ada masalah. Namun persoalan aset daerah (Asda) seperti kendaraan, bangunan, dan lahan setelah pemengkaran dengan Kabupaten Kubu Raya, yang belum diselesaikan. Hal ini, menjadi temaukan BPK, sehingga kita belum bisa meraih opini WTP," terang Rubijanto usai membuka lomba mewarnai, di Perpustakaan Mempawah.

Mantan birokrasi Rubijanto mengaku, demi mendapat opini WTP, Pemkab terus melakukan pembenahan masalah aset yang ada, serta memperbaiki administrasi pengolahan keuangan daerah. "Pemda terus melakukan pembenahan, terutama masalah aset yang menjadi persoalan kita, sehingga sulit mendapat opini WTP," terangnya.

Persoalan aset akunya, memang menjadi persoalan daerah pasca pemekaran. Sebab, hingga kini masih ada aset bergerak hibah dari pusat maupun pemprov tetapi tidak ada fakturnya.

Kendaraan yang diminta itu ada yang merupakan hibah dari provinsi tidak ada fakturnya sementara dipengelolaan aset faktur itu harus tetap tercantum supaya jika ada penyusutan itu gampang dideteksi.

"Masalah faktur inilah yang dicari sampai dengan saat ini dan tidak ada. Dan faktur itu tidak bisa dikarang karena merupakan aturan. Bagitu juga menyangkut inventaris bangunan tentang pembangunan itu sendiri. Itu harus tercantum dibangun pada tahun berapa," terang Rubijanto.

Alhamdulillah sedikit demi sedikit kata dia sudah mulai mengerucut. Namun, muncul pula status tanahnya. "Saya ingat betul pada tahun itu dimana kita akan membangun gedung SD inpres masyarakat tinggal menunjuk saja. Namun setelah puluhan tahun tidak pernah diurus status haknya. Ini yang menjadi persoalan," nilai dia. *(ham)*